

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Instansi yang mendampingi walikota dalam melangsungkan kewajiban bidang kedaмаian dan keteraturan lingkungan di bagian urusan kebakaran-yang merupakan salah satu wewenang daerah yang diresmikan pada Januari 2017, yakni merupakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan, yang berlokasi di Jalan Sutan Soripada Mulia No. 17 Sadabuan, Padangsidimpuan Utara. Sebagai pelaksana pemerintah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, yang juga populer dengan panggilan Disdamkar, bertugas untuk melayani permintaan masyarakat dalam mengatasi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran dipersiapkan untuk menghadapi keadaan darurat, termasuk menyelamatkan nyawa korban dalam kecelakaan dan musibah, selain memadamkan api.

Sejarah membuktikan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran telah membawa keuntungan bagi seluruh masyarakat sejak masa Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda menciptakan de Brandweer, semacam lembaga pemadam kebakaran pada masa itu. Setiap kota di pesisir dan hilir, meliputi Jakarta, Semarang, dan Surabaya, terdapat institusi ini. Pembentukan de Brandweer di setiap kota berbeda dalam kurun waktu yang tak bersamaan. Pendirian resmi pemadam kebakaran dimulai pada tahun 1919, seperti yang tercantum dalam prasasti "Batavia Brandweer Memorial 1919-1929". Tanggung jawab utama Dinas Pemadam Kebakaran adalah mengatur persoalan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan bencana kebakaran, tanggap darurat, penanggulangan, dan keselamatan (Darma, 2023a).

Selain membuat serangkaian kebijakan, Dinas Pemadam Kebakaran juga memantau penyelenggaraan pemerintahan daerah di ranah pemadam kebakaran dan penyelamatan, membimbing dan mengarahkan lembaga-organisasi yang berada di dalam lingkup wilayah kerjanya untuk meningkatkan kesiapan dalam merespon bencana kebakaran dan menjalankan operasi pertolongan ketika dibutuhkan, serta membuat evaluasi dan laporan terkait hal tersebut. Damkar sebagai tambahan dari pemadaman kebakaran, dapat mendampingi permasalahan masyarakat lainnya, seperti mengamankan hewan dan aset-asetnya. Warga dapat menghubungi Damkar untuk

meminta bantuan dalam menolong hewan dan juga menolong orang yang terseret arus banjir (Darma, 2023a).

## 2. Visi dan Misi

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan mempunyai visi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

“ Menjadi pelaksana pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran yang antipasif, responsif, dan profesional”

Sedangkan, misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan mencakup (Darma, 2023b) :

- a. Menyediakan pelayanan sikap profesional bidang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan siaga, perhatian beserta pencegahan.
- b. Menyediakan layanan yang tinggi dalam cakupan antisipasi, penanggulangan kebakaran serta pertolongan.
- c. Memberikan dorongan ketahanan sekitar di cakupan antisipasi dan penanggulangan kebakaran kepada khalayak ramai.
- d. Membangun sistem bekerja sama dengan elemen yang bersangkutan.

## 3. Logo dan Struktur Organisasi

### a. Logo dan Makna

Bagian logo perusahaan menjadi karakteristik yang membedakannya dari kompetitor. Secara umum, lambang perusahaan memiliki arti penting. Bentuk lambang yang sebenarnya disesuaikan dengan kebijakan bisnis dan tanggung jawab organisasi.

Berikut ini adalah bentuk logo Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan:



**Gambar 4. 1**

**Logo Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan**

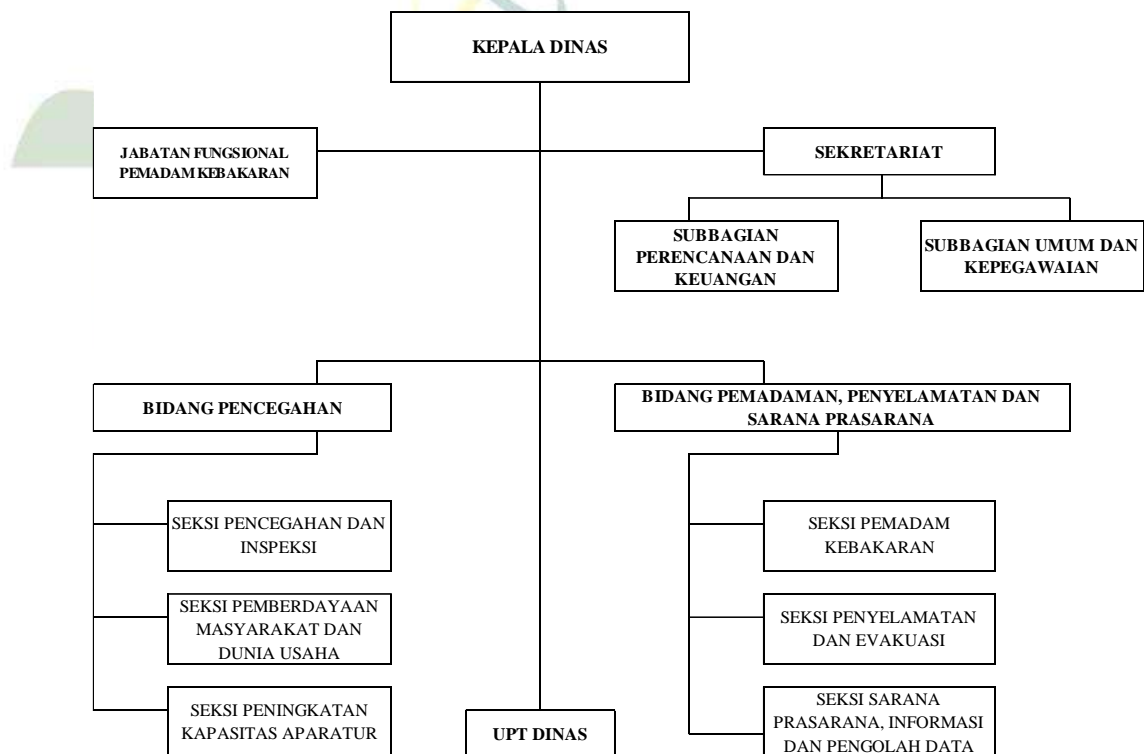
Adapun bentuk logo Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan meliputi tujuh bagian dengan makna di bawah ini (Nursal, 2024):

- 1) Sayap bunga wijaya terdiri dari lima helai kelopak, yang menandakan keberhasilan dalam semua operasi pemadaman dan penyelamatan. Kelima kelopak bunga wijaya merepresentasikan lima sila dari Pancasila.
- 2) Bundaran dan tali yang dililitkan menyimbolkan bahwa tugas pemadaman kebakaran adalah seperti sebuah bundaran yang tidak berujung dan tidak berakhir. Tali merepresentasikan perangkat penyelamatan dalam keadaan siaga dan bersedia untuk melakukan penyelamatan.
- 3) 19 lidah api yang menyala di dalam dua tangki, menandakan ancaman kebakaran yang terus menerus. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan didirikan pada tanggal 1 Maret 1919, dan disimbolisasikan dengan 19 lidah api.
- 4) Air merepresentasikan ketersediaan pasokan penting dalam memadamkan kebakaran.
- 5) Peralatan yang digunakan petugas pemadam kebakaran untuk melaksanakan tugas pokoknya dilambangkan dengan berbagai benda seperti helm, kapak, pemancar, dan selang.
- 6) Pada pita tertera tulisan "YUDHA BRAMA JAYA". Jaya bermakna kemenangan, brama bermakna api, dan yudha bermakna pertempuran. Dengan demikian, "YUDHA BRAMA JAYA" bermakna kemenangan dan pencapaian dalam pertempuran dengan api.

- 7) Warna biru, kuning, merah, dan putih. Putih menggambarkan kejujuran atau kemurnian, merah menggambarkan keperkasaan atau semangat yang berapi-api, kuning menggambarkan keagungan atau hati yang mulia, dan biru menggambarkan kesetaraan.

## b. Struktur Organisasi

Pemahaman akan fungsi, kewajiban, dan tanggung jawab yang terkait satu sama lain untuk setiap individu yang memegang posisi dalam organisasi atau lembaga ditunjukkan oleh struktur organisasinya. Diharapkan setiap pihak dapat menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan yang telah digariskan dalam kerangka kerja tersebut. Gambar 4.2 memperlihatkan kerangka struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan (Damkar, 2023) :



**Gambar 4. 2**

**Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan**

#### 4. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Pekerjaan

Berpegang kepada kerangka di atas maka dapat dipaparkan tentang perincian cakupan peran, fungsi, dan kewajiban setiap bagian. Terdapat beberapa bagian tindakan tersebut berpedoman struktur organisasi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan di bawah ini :

##### a. Kepala Dinas

Tanggung jawab utama Kepala Dinas adalah menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pelaksanaan tugas dan pembinaan fungsional, membina dan memberi petunjuk, membina kepemimpinan, mengembangkan kebijakan perencanaan teknis, melaksanakan dan mengendalikan bidang teknis, serta memantau penyelenggaraan aktivitas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) (Damkar, 2022).

##### b. Sekretariat

Fungsi utama dari Sekretariat adalah menyediakan layanan administratif dan teknis kepada segenap departemen kerja di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Sekretariat mengatur fungsi-fungsi berikut untuk menjalankan mandatnya (Damkar, 2022):

- 1) Pembuatan bahan ajar dan susunan kegiatan dan anggaran;
- 2) Pengerjaan dengan kelola terhadap keuangan;
- 3) Pengembangan aset, urusan tata usaha, rumah tangga, harta negara;
- 4) Pelatihan kepada aparat;
- 5) Penyediaan tugas tentang staf; dan
- 6) Penyediaan pengelolaan administrasi bagian teknis.

##### c. Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran

Dalam pelaksanaannya, Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran bersifat otonom sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku mengenai jabatan fungsional, kewajiban dan wewenang adalah mendorong pemimpin dalam melalui prosedur sesuai dengan keandalan, kompetensi, dan spesialisasinya (Damkar, 2022).

##### d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selain menangani urusan rumah tangga dan komunikasi, Subbagian Umum dan Personalia juga bertanggung jawab atas pembinaan pegawai, administrasi personalia, dan pemindahan karyawan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melakukan urusan (Damkar, 2022) :

- 1) Menyediakan kegiatan surat persuratan;
- 2) Mengembangkan kegiatan manajemen;
- 3) Menyediakan layanan data organisasi dan arsip;
- 4) Menjalankan layanan rumah tangga, penjagaan, dan keteraturan dalam gedung;
- 5) Menjalankan layanan pada alat-alat, harta pemerintah;
- 6) Menyajikan laporan capaian tingkat secara sistematis;
- 7) Menjalankan layanan terkait personalia, pelatihan petugas dan administrasi petugas sistematis;
- 8) Menjalankan wewenang lain yang disandarkan oleh petinggi sesuai dengan pekerjaan dan sistem.

**e. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki wewenang melakukan dan menyediakan layanan pelaporan rencana anggaran perolehan dan pengeluaran, pencatatan oleh pelaporan, penghitungan dan memastikan keakuratan dari pembukuan tersebut.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menjalankan wewenang (Damkar, 2022):

- 1) Menjalankan penyelarasan dan menyusun kegiatan anggaran serta laporan dan perbaikan sasaran target;
- 2) Menyediakan layanan kelola finansial, tata usaha, dan pencatatan, penyajian laporan;
- 3) Menyediakan alat balasan inspeksi, keakuratan, dan pelaporan; dan
- 4) Menjalankan urusan oleh petinggi sesuai dengan pekerjaan dan sistem sub bagian perencanaan dan keuangan dinas.

**f. Bidang Pencegahan**

Urusan Pencegahan menjalankan wewenang perencanaan, penyelarasan, mendukung, melatih, dan meredam serta memperbaiki di bagian pencegahan. Bagian pencegahan menjalankan sistem seperti (Damkar, 2022):

- 1) Menjalankan pengendalian kajian risiko, antisipasi dan mitigasi pada kebakaran dan menolong, serta inspeksi barang pertahanan kebakaran dalam kawasan;

- 2) Pengujian kajian, menyusun sistem dan kegiatan untuk mengembangkan dan mendorong kualitas petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- 3) Pembuatan dan pengembangan kualitas mutu Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), serta pelajaran dan pembekalan dalam layanan lingkungan dan wilayah usaha;
- 4) Menjalankan urusan lain yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan wewenang.

**g. Seksi Pencegahan dan Inspeksi**

Seksi Pencegahan dan Inspeksi menjalankan kewajiban utama membuat aturan dan pedoman sistem dalam melakukan peta kebakaran terbaru, menyajikan urusan untuk antisipasi dan selalu siap siaga dalam memantau kebakaran dan menolong korban.

Bagian Pencegahan dan Inspeksi menjalankan kegiatan (Damkar, 2022):

- 1) Membuat kumpulan dokumentasi data dan pengujian, menyusun data kajian pengendalian kebakaran dan perlindungan, di antaranya menyediakan dan peta rawan kebakaran terbaru dan data Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
- 2) Melaksanakan kegiatan program dan aktivitas antisipasi, siap siaga dan penyelamatan dalam lingkungan sekitar;
- 3) Menjalankan penyelidikan data, inventarisasi, pengukuran, pelatihan dan memastikan bahan alat perlindungan kebakaran dan penyelamatan dalam lingkungan;
- 4) Membuat kegiatan lain yang diterima dari pimpinan setimpal dengan wewenang dan kewajiban.

**h. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur**

Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur menyediakan kewajiban paling utama mengolah peraturan dan pedoman sistem dalam melaksanakan tugas pekerja pemadam kebakaran, perlindungan, pertumbuhan data kualitas kedudukan sistem yang telah disajikan serta pelatihan dan memastikan pengaturan petugas dengan prinsip yang berlaku.

Kewajiban seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur di antaranya (Damkar, 2022):

- 1) Menyelesaikan perencanaan sistem aturan, riset dan pengujian sesuai kebutuhan, serta pengaturan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- 2) Membuat rencana prosedur dan urusan pertumbuhan kualitas pelayanan keahlian kompetensi manajemen serta perilaku dan sifat spiritual petugas;
- 3) Menyediakan pelatihan dan pemeriksaan untuk memastikan penertiban petugas serta fasilitas menyiapkan masalah yang dihadapi oleh petugas yang bersangkutan;
- 4) Melaksanakan fungsi lain yang diserahkan oleh pimpinan sesuai dengan kewajiban.

**i. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha menjalankan urusan pengembangan pemberdayaan kepada masyarakat dan melaksanakan urusan dan kegiatan pembekalan dan pembelajaran kepada elemen masyarakat, bisnis dan kehidupan warganya.

Kewajiban seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha di antaranya (Damkar, 2022):

- 1) Membuat susunan rencana dan aktivitas kerja melakukan perlindungan dan Ketenagakerjaan.
- 2) Membentuk Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar), serta Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) sebagai penyelesaian pengembangan pelayanan pemberdayaan warga dan bisnis dalamantisipasi dan perbaikan kebakaran dengan;
- 3) Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) menjalankan agenda dan rencana pengembangan dan penambahan baik mendorong kualitas sistem kerja maupun manajemen;
- 4) Menjalankan agenda dan memberikan pembekalan kompetensi dan pembelajaran kepada kelompok lingkungan, pebisnis dan warga negara di wilayah yang telah ditetapkan; dan



- 5) Melaksanakan agenda lain yang diterima dari pimpinan sesuai dengan ketentuan.

**j. Bidang Pemadam, Penyelamatan dan Sarana Prasarana**

Bagian Pemadam, Penyelamatan dan Sarana Prasarana memiliki agenda utama menyusun, menguraikan, mengidentifikasi, melatih, memeriksa, dan mengambil kendali serta memperbaiki urusan pemadam, penyelamatan dan sarana prasana.

Bidang Pemadam, Penyelamatan dan Sarana Prasarana menjalankan kewajiban di bawah ini (Damkar, 2022):

- 1) Wilayah kota, dan pengendalian penanganan alat berbahaya beracun kebakaran dalam lingkungan sekitar mengatur penyajian respon cepat (*response time*), pengarahan jalan, pengaturan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- 2) Mengatur penyajian respon cepat (*response time*), pengarahan jalan, pengaturan penyelamatan dan pengungsian korban dan berdampak kebakaran, saat menghadapi bahaya lingkungan, dan agenda darurat non kebakaran; dan
- 3) Terpercaya antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dengan mengukur, pemetaan, standarisasi, mengidentifikasi kepentingan, pengadaan, mengatur, merawat infrastruktur pemadaman dan penyelamatan dan alat pelindung diri aparat, infrastruktur kebakaran bagi elemen publik, menjalankan sistem dokumen data dan pelaporan kebakaran, memastikan dan membentuk data kebakaran secara benar dan memberikan sikap tanggung jawab.

**k. Seksi Pemadam Kebakaran**

Bagian Pemadam Kebakaran menjalankan peran utama menata peraturan yang akan ditetapkan dan pedoman dalam melanjutkan pengawasan, menangani kebakaran yang terjadi.

Seksi Pemadam Kebakaran menjalankan perannya di bawah ini (Damkar, 2022):

- 1) Menjalankan operasi pengawasan menangani bahan berbahaya beracun kebakaran di daerah, pemadaman dan pengawasan kebakaran dalam lingkungan, serta pemadaman;
- 2) Mengadakan pengendalian dan melakukan penanggulangan layanan respon cepat (*response time*) kebakaran di Daerah;
- 3) Menyiapkan dalam operasi pemadaman aparatur dan sarana prasarana pendukung dan pengendalian kebakaran di Daerah;
- 4) Mengadakan peran lain yang diperlukan dan diberi oleh pimpinan sesuai dengan wewenang.

#### **l. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi**

Seksi Penyelamatan dan Evakuasi memiliki kewajiban menjalankan tanggapan, pendataan dan keakuratan data warga negara.

Seksi Penyelamatan dan Evakuasi mengadakan kewajiban (Damkar, 2022):

- 1) Menyediakan operasi penyelamatan layanan tanggapan cepat (*response time*) dan tindak lanjut korban dan menangani kebakaran di Daerah;
- 2) Menyediakan operasi penyelamatan layanan tanggapan cepat (*response time*) dan tindak lanjut pada program darurat non kebakaran lainnya di daerah dan kondisi bencana manusia;
- 3) Mengatur kondisi bencana manusia pendataan dan keakuratan warga negara yang menjadi korban dan tindak lanjut kebakaran dan operasi darurat non kebakaran lain di daerah;
- 4) Mengadakan peran lain yang diperlukan dan diberi oleh pimpinan setara dengan wewenang.

#### **m. Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data**

Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data memiliki peran meningkatkan kualitas kedudukan masyarakat, peran sosialisasi dan pembinaan kepada elemen masyarakat, bisnis dan publik.

Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data memiliki kewajiban (Damkar, 2022) :

- 1) Menyajikan uji kepentingan, inventarisasi, standarisasi terhadap alat pelindung diri aparat, identifikasi dan, melakukan pemeliharaan dan

- merawat infrastruktur pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta secara terpercaya antara pusat untuk menyampaikan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan, provinsi dan kabupaten/kota, mengatur dan pelayanan data kebakaran, verifikasi/validasi data penyelamatan, dan laporan kebakaran dan penyelamatan;
- 2) Menjalankan perangkat pemadam kebakaran fasilitasi pengadaan, memastikan, pengawasan dan perbaikan pemakai perangkat pemadam kebakaran bagi elemen lingkungan dalam pelindung dan tindak lanjut kebakaran;
  - 3) Menjalankan pengadaan pemadam kebakaran, penyaluran, pemeliharaan dan merawat infrastruktur dan penyelamatan, alat pertahanan diri aparat, dan perangkat pemadam kebakaran bagi lingkungan;
  - 4) Mengadakan peran lain yang diperlukan dan diberi oleh pimpinan sesuai dengan wewenang.

#### **n. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

Unit Pelaksana Teknis Dinas menyelesaikan kewajiban menjadi pemimpin, memastikan, merampungkan persoalan yang terjadi di lingkungan setempat

Unit Pelaksana Teknis Dinas menjalankan wewenang (Damkar, 2022):

- 1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) menjalankan urusan selayaknya pimpinan, menjalankan, memperbaiki aktivitas lapangan dan menyajikan hasil akhir keseluruhan.
- 2) Memastikan dan memberikan keterangan kasus terbaru di lapangan.
- 3) Menyediakan sifat kompeten dan menyelesaikan konflik yang datang dari lingkungan.
- 4) Menjalankan agenda kedinasan lain yang dijatuhkan oleh pimpinan.

## B. Temuan Penelitian

### 1. Deskripsi Data

Rujukan informasi untuk investigasi ini melalui data Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan detail perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam hal pendapatan, belanja, surplus, dan defisit. Sewaktu mengevaluasi kinerja pemerintah, informasi ini krusial. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan dalam pos-pos realisasi anggaran belanja yang dimasukkan dalam pengelompokan ekonomi (jenis pengeluaran) dibukukan (akuntansi) anggaran belanja.

Kinerja karyawan berpengaruh langsung terhadap kesuksesan atau gagalnya suatu organisasi, agar bisnis dapat menggapai tujuannya, maka tingkat kinerja di dalam organisasi harus dipertimbangkan (Nurwani & Bancin, 2023).

Diagram di bawah ini menunjukkan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan tahun 2018-2022 :

**Tabel 4. 1**

**Ikhtisar Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan Tahun 2018-2022**

Uraian	Tahun 2018		Tahun 2019	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Anggaran Belanja	6.143.037.152	5.784.953.922	6.709.888.193	6.088.513.316
Belanja Operasi	5.994.637.152	5.652.280.862	6.232.528.056	5.712.363.316
Belanja Modal	148.400.000	132.673.060	477.360.137	376.150.000

Uraian	Tahun 2020		Tahun 2021	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Anggaran Belanja	5.947.325.293	5.385.107.873	6.177.951.582	5.629.708.232
Belanja Operasi	5.848.484.428	5.372.057.873	5.903.515.457	5.360.340.232
Belanja Modal	98.840.865	13.050.000	274.436.125	269.368.000

Uraian	Tahun 2022	
	Anggaran	Realisasi
Anggaran Belanja	7.453.270.294	6.982.526.014
Belanja Operasi	7.156.569.641	6.710.691.014
Belanja Modal	296.700.653	271.835.000

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan

Bagian anggaran dan realisasi belanja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan dari gambaran di atas ditunjukkan bahwa selain daripada tahun 2020, terlihat jelas dari grafik di atas bahwa cenderung bertambah dalam lima tahun terakhir. Dari grafik berikut ini terlihat bahwa anggaran belanja tahun 2018-2022 tidak selalu terserap seluruhnya. Hal ini dikarenakan adanya rencana program tugas atau aktivitas yang bervariasi setiap tahunnya, serta meningkatnya kebutuhan pengeluaran. Selain itu, fluktuasi realisasi anggaran belanja juga disebabkan oleh realisasi yang tidak setara dengan anggaran yang telah ditentukan. Anggaran belanja meningkat menjadi Rp 7.453.270.294 pada tahun 2022, tahun yang mengalami kenaikan.

Anggaran belanja operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan mengalami pertumbuhan selama lima periode terakhir, terkecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2020 dan 2021, realisasi belanja operasional tercatat turun. Dengan anggaran sebesar Rp 7.156.569.641, jumlah yang disediakan untuk belanja operasional semakin meningkat di tahun 2022.

Selama lima tahun berturut-turut, anggaran belanja modal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan tidak selalu mengalami

penambahan. Anggaran belanja modal mengalami pengurangan di tahun 2020, peningkatan di tahun 2021, tersebut di tahun 2018-2022. Bersama anggaran mencapai Rp 296.700.653 dan realisasi sebanyak Rp 271.835.000 pada tahun 2022, terjadi kenaikan baik dari sisi anggaran serta capaian anggaran belanja modal. Dan pada tahun 2020, dengan anggaran sebanyak Rp 98.840.865 dan realisasi sebanyak Rp 13.050.000, hal tersebut terjadi penurunan pada anggaran belanja modal.

**a. Analisis Varians Belanja**

Menganalisis perbedaan antara realisasi dan yang rencana anggaran dikenal sebagai analisis varians belanja (Mahmudi, 2016). Upaya memperlihatkan seberapa banyak selisih dengan melakukan uji dengan formula ini:

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

**Tabel 4. 2**  
**Analisis Varians Belanja Tahun Anggaran 2018-2022**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih	Perbandingan (%)
2018	6.143.037.152	5.784.953.922	(358.083.230)	94%
2019	6.709.888.193	6.088.513.316	(621.374.877)	90%
2020	5.947.325.293	5.385.107.873	(562.217.420)	90%
2021	6.177.951.582	5.629.708.232	(548.243.350)	91%
2022	7.453.270.294	6.982.526.014	(470.744.280)	93%

Sumber: Data Hasil Olahan Tahun 2024

Data 4.2 memperlihatkan bahwa jumlah aktual yang terwujud pada tahun 2018 adalah Rp 5.784.953.922, atau 94%, berbanding Rp 6.143.037.152 yang dianggarkan. Hal ini merepresentasikan kesenjangan sebesar Rp 358.083.230, atau 6%. Hal ini mengindikasikan bahwa 6% dari alokasi anggaran untuk tahun ini belum terealisasi.

Dengan selisih sebesar Rp 621.374.877 atau 10%, anggaran untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp 6.709.888.193 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp 6.088.513.316 atau 90%. Hal ini menandakan adanya kenaikan penggunaan anggaran sebanyak 4% dari tahun sebelumnya.

Jadi selisih antara anggaran tahun 2020 sebesar Rp 5.947.325.293 dengan realisasi mencapai Rp 5.385.107.873 atau 90% adalah sebesar Rp 562.217.420 atau 10%. Berlainan dengan tahun sebelumnya, pemanfaatan anggaran tahun ini mengalami perbandingan yang serupa.

Realisasi anggaran tahun ini lebih rendah 1% dari tahun lalu, dengan perbedaan sejumlah Rp548.243.350 atau 9%. Anggaran untuk tahun 2021 menerapkan sejumlah Rp 6.177.951.582, sedangkan realisasinya tercatat sebesar Rp 5.629.708.232, atau 91%.

Selisih Rp 470.744.280, atau 7% dari keseluruhan anggaran, memisahkan anggaran tahun 2022 sebesar Rp 7.453.270.294 dengan realisasi Rp 6.982.526.014 atau 93%. Pada tahun anggaran 2021, anggaran mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu. Masih tersedia 7% dari keseluruhan anggaran yang mengindikasikan bahwa anggaran untuk tahun ini belum dimanfaatkan seluruhnya.

#### b. Analisis Pertumbuhan Belanja

Melalui analisis pertumbuhan belanja sangat membantu untuk memastikan apakah pertumbuhan belanja tahunan positif atau negatif.

Rumus berikut ini digunakan untuk menghitung kinerjanya: (Mahmudi, 2016).

$$\text{Pertumbuhan Belanja Thn}_t = \frac{\text{Realisasi belanja thn}_t - \text{Realisasi belanja thn}_{t-1}}{\text{Realisasi belanja thn}_{t-1}} \times 100\%$$

**Tabel 4. 3**  
**Analisis Pertumbuhan Belanja**  
**Tahun Anggaran 2018-2022**

Tahun	Realisasi	Kenaikan (Penurunan)	%
2017	4.654.411.917	-	-
2018	5.784.953.922	1.130.542.005	24,2%
2019	6.088.513.316	303.559.394	5,2%
2020	5.385.107.873	(703.405.443)	(11,5%)
2021	5.629.708.232	244.600.359	4,5%
2022	6.982.526.014	1.352.817.782	24%

Rata-rata	9,3
-----------	-----

Sumber: Data Hasil Olahan Tahun 2024

Dengan persentase sebesar 24,2%, pertumbuhan belanja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan pada tahun 2018 menyampaikan nilai positif, sebagaimana terlihat pada tabel di atas. Hal ini dipengaruhi oleh adanya penambahan pengeluaran sebanyak Rp 1.130.542.005 dari tahun lalu. Karena adanya kenaikan jumlah realisasi belanja sebesar Rp 303.559.394 dibandingkan tahun sebelumnya, maka perkembangan belanja pada tahun 2019 menjadi positif sebesar 5,2%.

Penyebab adanya pengurangan jumlah realisasi pengeluaran sebesar Rp 703.405.443 dari tahun sebelumnya, maka tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan pengeluaran yang negatif sebanyak 11,5%. Kenaikan pengeluaran pada tahun 2021 juga cukup baik, tetapi tidak sebanyak persentase pada tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan pengeluaran adalah senilai Rp244.600.359, atau 4,5%. Dikarenakan adanya penurunan sebesar 24% pada jumlah realisasi pengeluaran, atau sebesar Rp 1.352.817.782, pertumbuhan pengeluaran pada tahun 2022 menjadi positif.

**c. Analisis Kecerassian Belanja**

Menentukan keseimbangan antara pengeluaran dapat dilakukan dengan memanfaatkan analisis kecerassian pengeluaran. Hal ini berhubungan dengan peran anggaran dalam pemerataan, pembagian, dan penetapan. Agar anggaran dapat dioperasikan secara konsisten, pemerintah daerah harus mengatur pengeluaran pembelanjaan (Mahmudi, 2016).

**1) Belanja Operasional**

Analisis Pengujian yang membandingkan total biaya operasional dengan total pembelanjaan disebut "pengujian biaya operasional dengan total pembelanjaan." Pengeluaran operasional adalah pengeluaran yang terjadi dengan manfaat yang direalisasikan dalam satu tahun fiskal; oleh karena itu, pengeluaran ini sering kali bersifat normal dan berulang, tetapi juga memiliki durasi yang terbatas.

Ini adalah formula untuk rasio biaya operasional:



$$\text{Total Belanja Operasi} = \frac{\text{Total belanja operasi}}{\text{Total belanja}} \times 100\%$$

**Tabel 4. 4**  
**Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja**  
**Tahun Anggaran 2015-2019**

Tahun	Total Belanja Operasi	Total Belanja	Persentase (%)
2018	5.652.280.862	5.784.953.922	97,70
2019	5.712.363.316	6.088.513.316	93,82
2020	5.372.057.873	5.385.107.873	99,75
2021	5.360.340.232	5.629.708.232	95,21
2022	6.710.691.014	6.982.526.014	96,11
Rata-rata			96,52

*Sumber: Data Hasil Olahan Tahun 2024*

Data mencatat bahwa pada tahun 2018, sebesar Rp 5.652.280.862 atau persentasi sebanyak 97,70% dari total realisasi dialokasikan untuk pengeluaran operasional. Penggunaan beban operasional pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 5.712.363.316, atau 93,82%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, secara keseluruhan beban usaha pada tahun 2020 naik menjadi Rp 5.372.057.873, atau 99,75%.

Pada tahun 2021, terdapat penurunan jumlah yang digunakan untuk beban operasional dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak Rp 5.360.340.232, atau 95,21%. Dengan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya, pengeluaran operasional pada tahun 2022 mencapai Rp 6.710.691.014 atau 96,11% dari total pengeluaran.

## **2) Belanja Modal**

Perbandingan yang menggambarkan realisasi jumlah belanja modal bersama jumlah total belanja daerah disebut dengan Analisis Belanja Modal terhadap Belanja Daerah. Persentase belanja daerah yang diperuntukkan bagi kepentingan investasi dalam wujud pengeluaran belanja modal pada tahun anggaran yang berkenaan dapat ditetapkan oleh pembaca laporan dengan memanfaatkan rasio ini (Mahmudi, 2016).

Formula penilaian tingkat sasaran di antaranya:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total belanja modal}}{\text{Total belanja}} \times 100\%$$

**Tabel 4. 5**  
**Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja Tahun Anggaran 2015-2019**

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja	Persentase
2018	132.673.060	5.784.953.922	2,29%
2019	376.150.000	6.088.513.316	6,17%
2020	13.050.000	5.385.107.873	0,24%
2021	269.368.000	5.629.708.232	4,78%
2022	271.835.000	6.982.526.014	3,89%
Rata-rata			3,47

*Sumber: Data Hasil Olahan Tahun 2024*

Informasi tersebut memperlihatkan bahwa pada tahun 2018, sebesar Rp 132.673.060 atau sekitar 2,29% dari realisasi saat ini dihabiskan untuk proyek-proyek modal. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah belanja modal di tahun 2019 lebih tinggi, yaitu sebesar Rp 376.150.000, atau 6,17% dari total pengeluaran. Pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah yang dihabiskan untuk belanja modal, yaitu mencapai Rp 13.050.000 atau sebanding dengan 0,24% dari total pengeluaran.

Sebanyak Rp269.368.000, atau sekitar 4,78%, terpakai untuk belanja modal pada tahun 2021. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan pemakaian anggaran untuk belanja modal pada tahun ini. Sementara itu, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah biaya yang dihabiskan untuk belanja modal di tahun 2022 lebih rendah sebesar Rp271.835.000 atau 3,89% dari tahun lalunya.

#### **d. Rasio Efisiensi**

Tingkat penghematan anggaran pemerintah dihitung dari rasio efisiensi belanja. Keterkaitan antara produksi dan layanan (*output*) yang diciptakan oleh suatu aktivitas dengan sumber daya (*input*) yang paling sedikit yang dimanfaatkan

disebut efisiensi. Kapasitas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan dalam memanfaatkan anggaran yang terkoneksi langsung dengan implementasi aktivitas yang sesedikit mungkin untuk mewujudkan *output* yang maksimal dalam menyediakan kebutuhan layanan bagi masyarakat akan dideskripsikan dalam analisis efisiensi pengeluaran dalam studi ini. Rasio antara jumlah aktual dan jumlah yang diharapkan dapat digunakan untuk menentukan seberapa efisien suatu pengeluaran. Rasio antara jumlah aktual dan jumlah yang dikeluarkan dengan jumlah yang direncanakan. Belanja langsung, yang meliputi belanja modal, barang dan jasa, dan biaya pegawai (gaji), yakni berhubungan dengan prosedur belanja yang dianggarkan yang secara langsung. Jumlah total yang dihabiskan terdiri dari pengeluaran langsung dan tidak langsung, termasuk pengeluaran tenaga kerja tidak langsung seperti untuk tunjangan. Keberhasilan keuangan pengeluaran pemerintah berhubungan positif dengan penurunan rasio efisiensi pengeluaran langsung (Mardiasmo, 2018).

Formula Rasio efisiensi di antaranya:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

**Tabel 4. 6**  
**Rasio Efisiensi Tahun Anggaran 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Persentase</b>
2018	5.784.953.922	6.143.037.152	94,17 %
2019	6.088.513.316	6.709.888.193	90,73%
2020	5.385.107.873	5.947.325.293	90,54%
2021	5.629.708.232	6.177.951.582	91,12%
2022	6.982.526.014	7.453.270.294	93,68%
Rata-rata			92,05%

*Sumber: Data hasil Olahan Tahun 2024*

Berdasarkan data tersebut menggambarkan bahwa, pada tahun 2018, anggaran terpakai 94,17% secara efisien, sehingga mencapai total realisasi anggaran sebesar Rp 5.784.953.922. Pencapaian penggunaan anggaran tahun ini dapat diterangkan oleh inefisiensi yang terus dilakukan oleh pemerintah dalam memangkas pengeluaran.

Dengan total realisasi anggaran sebesar Rp 6.709.888.193, tingkat efisiensi pemakaian anggaran di tahun 2019 adalah sebesar 90,73%, yang dapat dianggap sebagai tingkat penghematan pengeluaran pemerintah yang cukup efisien. Lebih jauh lagi, dapat dikemukakan bahwa tingkat efisiensi pemanfaatan anggaran tahun ini melampaui tingkat efisiensi tahun lalu.

Dengan total realisasi anggaran mencapai Rp5.947.325.293 pada tahun 2020, tingkat efisiensi pemakaian anggaran tercatat sebesar 90,54%, dan dapat dianggap cukup efisien dalam hal penghematan pengeluaran.

Dengan total realisasi anggaran sebanyak Rp6.177.951.582 pada tahun 2021, tingkat efisiensi penggunaannya sebesar 91,12%, mengindikasikan bahwa pemerintah masih belum mampu melakukan penghematan anggaran.

Selain itu, dengan total realisasi anggaran sebesar Rp7.453.270.294 pada tahun 2022, tingkat efisiensi penggunaan anggaran dengan capaian 93,68%, yang menunjukkan bahwa pemerintah masih kurang efektif dalam menjalankan penghematan.

## 2. Hasil Wawancara

Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan dapat dikatakan sebagai pemakai laporan realisasi anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan ringkasan dari awal, penyediaan aktivitas dan sebagai pemakai dana finansial yang diselesaikan pada satu tahun dalam tahun. Berdasarkan wawancara dengan bapak Aswin selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan menyebutkan bahwa aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan penyusunan laporan realisasi anggaran adalah dengan melihat dari laporan terdahulu untuk diproyeksikan di tahun depan.

*“Kalau dari aspek keuangan, siapkan rancangan perencanaan pembelanjaan anggaran ketika membuat susunan realisasi anggaran harus didapatkan yang berasal pembukuan lalu, diproyeksikan untuk di tahun ke depan banyaknya perkembangan yang telah diduga sebelumnya, itu yang menjadi patokan dalam membuat susunan keuangan. Tingkat efektivitas dapat ditingkatkan dengan cara mengutamakan pengeluaran wajib dan melakukan penyerapan anggaran dengan tepat waktu”.*

Dalam satu siklus anggaran, setiap hal berikut ini disandingkan dengan anggarannya dan dengan prediksi laporan realisasi anggaran tahun yang lalu:

pendapatan, pengeluaran, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan. Untuk mencapai kemakmuran dan keberhasilan, masyarakat menuntut pemerintah untuk dapat melaksanakan misinya secara efektif. Mohammed (2003) mengidentifikasi bahwa beberapa kelemahan yang ada dalam penyediaan layanan publik adalah: kurang efisien dan kurang memperhatikan kepentingan, aspirasi, dan tujuan masyarakat, kurang terkoordinasi, birokratis, kurang mudah dijangkau, dan kurang informatif. Oleh karena itu, hal krusial yang perlu dipertimbangkan oleh para personil adalah konsep kepemimpinan yang baik (good government governance) (Hasibuan & Hasibuan, 2022). Laporan Anggaran memiliki prioritas menyeluruh untuk sektor meningkatkan layanan publik sejalan dengan hasil wawancara dengan ibu Erlinda Habib terkait sektor yang diprioritaskan dalam penyusunan anggaran.

*“Diprioritaskan untuk segala hal yang berhubungan untuk meningkatkan layanan publik. Seluruh aspek untuk pemantauan dan memastikan pada wewenang yang diberikan kepada pemerintah dan menyelesaikan tugasnya yang meliputi resmi maupun tidak resmi, mempengaruhi urusan publik untuk menciptakan atau mewujudkan pemerintahan yang baik”.*

Perencanaan laporan anggaran demi pengembangan kapasitas penyediaan layanan ekonomi sampai dapat melakukan pendorongan pada pengembangan ekonomi secara menyeluruh dan terserap sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Begitu juga dengan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan mengenai serapan anggaran selama lima tahun terakhir (2018-2022) menurut wawancara dengan pak Aswin Ritonga mengatakan bahwa sudah cukup baik.

*“Serapan anggaran yang telah diselesaikan dapat dipaparkan sudah cukup baik. Oleh itu disebabkan serapan berada di atas rata-rata 90% dan tidak ada pengeluaran yang di luar dari capaian anggaran yang telah di sajikan”.*

Melihat besar serapan anggaran yang terlaksana dapat menilai keefektifan dan efisien suatu anggaran, pengukuran kinerja yang dilakukan sudah sesuai standar atau tidak. Estimasi mengenai kegiatan organisasi di masa depan disertakan dalam pemasukan dan pengeluaran anggaran. Setiap anggaran menjabarkan tugas-tugas yang harus dituntaskan selama beberapa bulan ke depan. Hasil wawancara dengan Bapak Aswin Ritonga memperlihatkan bahwa terdapat beberapa hambatan yang menghalangi pencapaian tujuan realisasi anggaran setiap periode.

*“Terdapat kecenderungan untuk memperkecil alokasi anggaran untuk aktivitas tertentu untuk menyisihkan dana bagi proyek lain, dan biasanya terjadi*

*pengeluaran yang tidak terduga untuk kebutuhan uang persediaan selama satu bulan”.*

Salah satu kelemahan anggaran dalam perencanaan adalah kecenderungan untuk mengurangi alokasi anggaran untuk beberapa kegiatan agar dapat menyediakan lebih banyak dana untuk inisiatif lain. Salah satu mencegah hal tersebut dengan ketepatan dalam penyerapan anggaran, tetapi ditemukan di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan masih terdapat keterlambatan dalam penyerapan anggaran. Menurut ibu Erlinda Habib ada penyebab utama dari keterlambatan tersebut dalam wawancaranya.

*“Hal ini termasuk penyiapan anggaran yang kurang baik, yang seringkali berlangsung lama dan menimbulkan pengesahan yang tertunda, sehingga tujuan realisasi anggaran tidak tercapai; dan juga perencanaan anggaran yang kurang baik akan menghalangi proses diskusi”.*

Lambatnya penyerapan anggaran sering kali tidak setara dengan susunan yang telah disepakati. Penyerapan anggaran tidak dilaksanakan pada awal tahun sehingga memengaruhi mekanisme pengelolaan anggaran di kemudian hari. Rasio efisiensi dapat digunakan untuk mengukur seberapa banyak yang dapat dihemat dengan menggunakan anggaran belanja. Pada tahun 2018, 2021, 2022 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan kurang dalam penghematan anggaran dan hasil wawancara dengan bapak Aswin Ritonga menyebutkan bahwa penyebab dari hal tersebut.

*“Karena ada biaya-biaya yang mungkin bisa dikurangi penggunaannya. Contoh seperti perjalanan biaya dinas selama dua hari menjadi sehari tanpa ada biaya liburan tambahan. Akan berdampak pada banyaknya biaya yang seharusnya tidak perlu tetap dikeluarkan dan terjadi pemborosan”.*

Anggaran yang telah disiapkan harus dipublikasikan dengan cara yang mudah dipahami tanpa ambiguitas. Transparan, yaitu kegiatan perencanaan, penyelesaian serta pertanggungjawaban anggaran negara harus memperlihatkan tidak hanya oleh wakil rakyat, tetapi bahkan juga oleh lingkungan umum. Hasil wawancara dengan bapak Aswin Ritonga mengatakan bahwa prosedur dari mempublikasi laporan realisasi anggaran di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan kota Padangsidempuan di antaranya.

*“Untuk saat ini belum dipublikasikan, hanya disusun secara manual. Dampak dari kurangnya transparansi salah satunya berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah”.*

## **C. Pembahasan**

### **1. Analisis Varians Belanja**

Capaian pemenuhan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan pada tahun 2018 adalah senilai Rp5.784.953.922,- atau 94% dari anggaran, merujuk pada hasil analisis varians belanja. Ditunjukkan penggunaan anggaran tahun 2019 senilai Rp6.088.513.316 atau 90% dari anggaran, pada tahun 2020 mencapai Rp5.385.107.873 dari anggaran, dan pada tahun 2021 mencapai Rp5.629.708.232 atau 90% dari anggaran. Selain itu, Rp 6.982.526.014 atau 93% dari anggaran yang telah dimanfaatkan di tahun 2022.

Bersama itu dipastikan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan telah memaksimalkan penggunaan anggaran dengan baik dengan memperhatikan persentase penggunaan anggaran dan variasi pengeluaran. Selain itu, sebanyak Rp6.982.526.014,- atau 93% dari anggaran - dimanfaatkan pada tahun 2022.

Dengan tersedianya pemakaian anggaran secara cermat dan anggaran dipakai dengan tidak adanya pengeluaran yang melampaui, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan telah menjalankan kinerjanya dengan baik dalam hal pemakaian anggaran, didasarkan pada persentase pemakaian anggaran dan variasi pengeluaran. Sesuai dengan riset Bilqis tahun 2022, yang didasarkan pada wawancara dengan departemen keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan dengan memakai analisis pertumbuhan belanja, kinerja anggaran saat ini pada dasarnya dapat disebutkan baik karena adanya penghematan anggaran. Tahun 2018 memiliki tingkat penyerapan anggaran terbesar yaitu 94%, sedangkan tahun 2019 dan 2020 memiliki tingkat penyerapan terendah yaitu 90%.

Jika pengeluaran aktual melebihi pengeluaran yang dianggarkan, maka kinerja pemerintah sering dipandang kurang baik. Akibatnya, pemerintah perlu menekan pengeluaran dan memanfaatkan anggaran yang ada.

## 2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Perubahan kuantitas cakupan layanan, pergerakan nilai tukar mata uang rupiah, penyesuaian terhadap inflasi, dan perubahan variabel makroekonomi, semuanya memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan pengeluaran secara keseluruhan. Pertumbuhan belanja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan tergolong bervariasi, yang mengindikasikan bahwa tidak selalu menghadapi data naik tetapi juga data yang turun, sesuai dengan hasil analisis yang diperoleh untuk tahun anggaran 2018-2022. Tahun 2020 terjadi penurunan kenaikan belanja, yaitu -11,5.

Pertumbuhan anggaran tumbuh sebesar 24,2%, 5,2%, 4,5%, dan 24% pada tahun 2018, 2019, 2021, dan 2022. Sementara terjadi penurunan pertumbuhan belanja pada tahun 2020, secara menyeluruh pertumbuhan belanja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dikategorikan baik karena mengalami kenaikan mendapat rerata positif. Pengujian riset ini memakai analisis pertumbuhan belanja sesuai bersama terhadap riset Nadra Suhaila Lubis tahun 2021 yang menguraikan apabila pertumbuhan dengan nilai positif memperlihatkan bahwa pemerintah sudah sanggup melakukan pertahanan dan meningkatkan pertumbuhan pemerintahannya.

## 3. Analisis Keserasian Belanja

Bersumber untuk mempelajari kesesuaian pengeluaran dan mengutamakan alokasi dana, seseorang dapat mengkalkulasi rasio pengeluaran operasional dan modal. Indikator ini sangat berguna untuk memahami keseimbangan antar pengeluaran. Pengeluaran operasional pada tahun 2018 mencapai 97,70%, sedangkan belanja modal adalah sebesar 2,29%, bersumber pada hasil kajian keserasian belanja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan tahun anggaran 2018-2022. Pengeluaran operasional mencakup 93,82% dari pengeluaran tahun 2019, sementara pengeluaran modal mencapai 6,17%.

Pada tahun 2020, menyajikan persentase sebanyak 0,24% pengeluaran ditujukan untuk proyek-proyek modal dan 99,75% untuk biaya operasional. Biaya operasional mencapai 95,21% dari total biaya pada tahun 2021, Sementara itu, belanja modal mencapai 4,78%. Selain itu, pada tahun 2022, belanja modal mencapai 3,89% dan belanja operasional sebanyak 96,11%. Dari hasil pengujian tersebut, terlihat jelas bahwa biaya operasional sering kali mendapatkan prioritas yang lebih tinggi dalam hal



pemakaian anggaran dibandingkan dengan biaya modal. Pengeluaran operasional rata-rata berjumlah 96,52%. Sementara itu, 3,47% adalah rata-rata pengeluaran modal. Akibatnya, belanja modal menempati porsi yang sangat kecil dari anggaran; pada tahun 2019, realisasi pengeluaran modal adalah 6%. Dari tahun 2018 hingga 2022, biaya operasional secara sistematis melampaui 90%, yang seharusnya sesuai ketentuan persentase belanja yang dialokasikan harus sebanyak 60-90%. Selain itu, belanja modal berada di bawah persentase yang ditetapkan yakni 5-20%. Hal ini memperlihatkan bahwa sebagian besar anggaran disisihkan untuk pengeluaran yang manfaatnya habis dalam satu tahun fiskal. Jangka menengah dan panjang masih sedikit diperoleh melalui hasil pengujian yang dilaksanakan dapat dipaparkan bahwa tidak banyak investasi.

#### **4. Analisis Efisiensi Belanja**

Pengujian yang dilakukan pada sasaran dari bagian efisiensi belanja dalam studi ini adalah untuk menggambarkan seberapa baik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan mendayagunakan dana yang tersedia untuk melanjutkan aktivitas yang paling sedikit untuk menghasilkan layanan yang paling banyak kepada publik. Pemaparan dan interpretasi temuan studi ini mengacu pada hasil analisis metrik efisiensi pengeluaran yang telah dipaparkan sebelumnya.

Berlandaskan pada temuan studi efisiensi belanja yang telah ditetapkan, tingkat efisiensi pemerintah pada tahun 2018 adalah 94,17%, yang menaruhnya pada kategori kurang efisien. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran pemerintah masih belum efisien. Maksud dari bagian efisiensi belanja dalam studi ini adalah untuk mengkarakterisasi sejauh mana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan memanfaatkan dana yang dimiliki dalam rangka menjalankan aktivitas yang paling sedikit yang diperlukan untuk menghasilkan layanan yang paling banyak kepada publik. Diskusi dan interpretasi temuan studi ini didasarkan pada temuan analisis metrik efisiensi belanja yang telah diungkapkan sebelumnya.

Sesuai dengan temuan studi efisiensi belanja, tingkat efisiensi pemerintah pada tahun 2018 adalah 94,17%, yang menempatkannya pada posisi kurang efisien. Karena persentase rata-rata sebesar 92,05, maka pengujian dengan rasio efisiensi pengeluaran mengindikasikan bahwa secara umum, analisis kinerja pengelolaan anggaran belanja tahun 2018-2020 dapat dikategorikan kurang efisien. Namun, dengan pengeluaran yang relatif kecil dibandingkan dengan anggaran yang disediakan, atau proporsinya masih di bawah 100%. Temuan interview yang mengindikasikan bahwa penghematan

dapat dimanfaatkan untuk keperluan belanja di masa mendatang, konsisten dengan riset Heriadi (2019), yang menemukan bahwa pembuatan dan penggunaan anggaran belanja tidak efisien.

